

RINGKASAN

Siti Aisah, 2019, **Evaluasi Kinerja Badan Perwakilan Desa Dalam Menjalankan Peran Dan Fungsinya Di Era Otonomi Daerah (Studi di Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo)**, Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si, Erlinda Puspitasari, S.AP.,M.AP, 83 hal+xviii

Otonomi daerah merupakan suatu instrumen politik dan instrumen administrasi atau manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat daerah. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah sebuah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah mengenai Evaluasi kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menjalankan peran dan fungsinya di era otonomi daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD) di tingkat desa terutama dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra kerja pemerintah desa serta mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara (interview), observasi (pengamatan), dan teknik dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Adapun lokasi penelitian ini di Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 3 pihak yaitu pihak pemerintah desa, pihak BPD dan tokoh masyarakat.

Adapun hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD belum berjalan secara optimal, hal itu dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi 1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, belum berjalan sesuai undang-undang yang berlaku dimana tidak adanya satu peraturan yang dikeluarkan. 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, terkesan pasif karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah desa maupun BPD kepada masyarakat. 3) melakukan pengawsan kinerja kepala desa, kurangnya kerjasama antara kepala desa dengan pihak BPD sehingga pendapat keduanya tidak sejalan.

Penelitian ini juga menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan evaluasi yang dihadapi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam kerjanya. Adapun yang menjadi faktor penghambat adalah masyarakat, minimnya pendapatan insentif, tidak adanya sarana dan prasarana serta kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD.

Kata kunci : Kinerja, Evaluasi, BPD, Otonomi Daerah

SUMMARY

Siti Aisah, 2019, **The evaluation of Village Council in carrying out of role and this function in Regional Autonomy Era (Study of in Jatisari Village, Kuripan District, Probolinggo Regency)**, Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si, Erlinda Puspitasari, S.AP., M.AP, 83 pages+xviii

Regional autonomy is a political and administrative or management instrument used to optimize local resources so that they can be utilized as much as possible for the advancement of local communities. Village Council (BPD) is an institution that is a manifestation of democracy in the administration of village government which involves the community in its administration. In this study the problem raised was regarding the evaluation of the performance of the Village Council (BPD) in carrying out its role and function in the era of regional autonomy.

This research aims to evaluate the performance of the Village Council (BPD) at the village level, especially in carrying out its role and function as a partner of the village government as well as knowing the inhibiting factors in the performance evaluation of the Village Council (BPD).

This research used descriptive research method with qualitative approach. The data collection in this study is through interviews, observations, and documentation techniques. While the data analysis used is data analysis according to Miles and Huberman which consist of data reduction, data presentation, drawing conclusions or data verification. The location of this research is in Jatisari village, kuripan district, Probolinggo Regency. Interviewees in this research consisted of 3 such as the village government, Village Council (BPD) and community leaders.

The results of this study can be concluded that the performance of the BPD has not been running optimally, it can be seen from a variety of indicators which include 1) discussing and agreeing on village draft regulations, not yet in accordance with applicable laws where no single regulation was issued. 2) accommodate and channel the aspirations of the community, seemingly passive due to lack of socialization and the village government or BPD to the community. 3) monitoring the performance of the village head, lack of cooperation between the village head and the BPD so that the opinions of the two are not in line.

This research also analyzes the inhibiting factors in the implementation of the evaluation faced by the Village Council (BPD) in its performance. As for the inhibiting factors are the community the lack of facilities and infrastructure as well as the lack of coordination between the village government and the BPD.

Keywords: Performance, Evaluation, Village Council (BPD), Regional autonomy.